

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
(STUDI KASUS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DI DESA KARYA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU)**



Oleh:

MARLINDA NURLELA
10675005113

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN (PPK)**

(Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Karya
Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu)

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dari
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

MARLINDA NURLELA
NIM : 10675005113

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2 0 1 0

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

(Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu)

ABSTRAK
Oleh
MARLINDA NURLELA

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu , apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PPK.

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka populasi penelitian ini adalah anggota PPK tingkat kecamatan dan desa yang berjumlah 53 orang. Karena terbatasnya jumlah populasi maka semua populasi dijadikan sebagai sampel, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui observasi, kuesioner, serta wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk naskah dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu kebanyakan (76,19%) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PPK, bahkan ada juga responden yang menyatakan sangat sesuai yakni (1,44%), namun walaupun begitu masih ada juga responden yang menilai pada kategori cukup sesuai (16,98%), dan yang menilai kurang sesuai (5,21%), bahkan ada yang belum sesuai sama sekali (0,18%).

Oleh karena itu disarankan pemerintah harus lebih perhatian lagi terhadap program ini agar masyarakat bisa merasakan setiap pembangunan yang dilaksanakan, sehingga dapat bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Disamping itu pemerintah harus melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan evaluasi yang didasari pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	v
DAFTAR TABEL -----	vii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
I.1. Latar Belakang Masalah -----	1
I.2. Perumusan Masalah -----	13
I.3. Tujuan Penelitian -----	14
I.5. Manfaat Penelitian -----	14
I.6. Sistematika Penulisan -----	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	17
II.1. Kerangka Teori -----	17
II.1.1. Pengertian Pembangunan -----	17
II.1.2. Pembardayaan Masyarakat -----	24
II.1.3. Pengawasan -----	30
II.1.4. Evaluasi -----	33
II.2. Hipotesis -----	41
II.3. Variabel Penelitian -----	42
II.4. Defenisi Konsep -----	43
II.5. Konsep Operasional -----	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN -----	49
III.1. Jenis Penelitian -----	49
III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian -----	49
III.3. Jenis dan Sumber Data -----	50
III.4. Populasi dan Sampel -----	51
III.5. Teknik Pengumpulan Data -----	53
III.6. Analisis Data -----	54
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN -----	55
IV.1. Gambaran Umum Kecamatan Rambah Samo -----	55
IV.2. Gambaran Umum Desa Karya Mulya -----	57
IV.3. Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) -----	66

BAB V	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN-----	69
V.1.	Identitas Responden -----	69
V.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasarana (fisik) Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu -----	71
V.2.1.	Prinsip Evaluasi -----	72
V.2.2.	Tolak Ukur Pembangunan-----	88
V.3.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kecamatan (PPK) Pada Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana (fisik) Di Desa Karya mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu -----	101
BAB VI	PENUTUP-----	105
VI.1.	Kesimpulan -----	105
VI.2.	Saran-Saran -----	108
	Daftar pustaka	
	Lampiran	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa pendapat dan teori sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

II.1.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) (Siagian.SP, 2005:4).

Menurut Siagian.SP (Ibid,4-5), menyatakan ada tujuh ide pokok pembangunan yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per defenisi* bersifat multidimensional.
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan

situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Sebenarnya administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmu dalam rumpun administrasi negara dengan fokus proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu national dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah ketika menghadapi tantangan dengan memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Adapun pengertian dari administrasi pembangunan yaitu: *"Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya"*. Ciri-ciri dari administrasi pembangunan adalah :

1. Lebih memberikan perhatian kepada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi masyarakat yang baru berkembang.
2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan yang efektif.
3. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik/berorientasi masa depan.
4. Lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintahan dan berfungsi sebagai *development agent*.
5. Lebih mendekat kepada substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang.
6. Administrator dalam aparaturnya pemerintah juga merupakan penggerak perubahan (*change agent*).
7. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. (Ibid, 7)

Tugas pembangunan merupakan tugas semua komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Namun demikian, peranan pemerintah sangat

dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional (Ibid,142-149), adalah :

1. Peran Selaku Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator , yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang kondusif didalam masyarakat baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh kedepan” (*quantum leap*).

2. Peran Selaku Inovator

Merupakan produk kreativitas dari pemerintah. Pemerintah memberikan bebas pajak untuk program-program yang sifatnya untuk pembangunan. Kesemuannya itu berarti bahwa sistem, prosedur dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”. Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga ”terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

3. Peran Selaku Modernisator

Untuk menjadikan negara maju harus ada usaha untuk memodernisasikan masyarakat. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure*. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan

sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “nasibnya”, kesediaan mengambil resiko, dan orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan.

4. Peran Selaku Pelapor

Pemerintah menjadi sebuah model dalam kehidupan masyarakat. Dimana pemerintah harus memainkan peranan selaku pelapor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelapor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pemerintah melakukan kegiatan swadaya dan swasembada.

Menurut Arif Budiman (2000:4), yang bisa menjadi tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah berhasil adalah:

1. Kekayaan Rata-rata

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.

2. Pemerataan

Cara mengukur pemerataan, jika 40% dari jumlah penduduk miskin menerima kurang dari 12% dari GNP maka ketimpang dianggap tinggi dan jika 40% dari jumlah penduduk termiskin menerima antara 12-17% dari GNP maka pertimpangan dianggap sedang, tetapi apabila 40% dari jumlah penduduk termiskin menerima lebih dari 17% dari GNP maka ketimpang dianggap rendah.

3. Kualitas Kehidupan

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur 3 indikator yaitu: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata persentase buta dan melek huruf.

4. Keseimbangan/Kerusakan Lingkungan

Pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan, contohnya lumpur lapindo.

5. Kestinambungh/*Continuity*

Dimana pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Negara Indonesia saat ini tengah menerapkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 yang pengganti penyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian Widjaja (2001:7) menyatakan bahwa :

“Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dengan prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat”.

Pembangunan selain menjadi kewajiban masing-masing pemerintahan di daerah pemerintah pusat juga berkewajiban melaksanakan kebijakan secara nasional. Dalam rangka efektifitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan (Sufian,2006:5) menyatakan sebaiknya meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Upaya-upaya besar tersebut merupakan bagian dari konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual, antara lain :

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa, melalui upaya pemberdayaan koperasi dan bahan pertanian, masukan modal, penyediaan teknologi, penataan kembali sistem produksi dan distribusi dan pemasaran produk pedesaan.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat pedesaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta proses pembelajaran. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan gizi.
- c. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai pelapor (*agen*) pembangunan pedesaan.
- d. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian perikanan dan lain-lain dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- e. Membangun sarana-prasarana perdesaan serta memberikan kemudahan bagi para investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di pedesaan
- f. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi dan struktur tanah, potensi alam dan potensi masyarakat serta kondisi permintaan pasar.

Dalam Trilogi pembangunan mengandung 3 unsur pokok yang merupakan 3 dimensi artinya mencerminkan 3 segi permasalahan dalam pembangunan sebagai suatu proses kegiatan secara terus-menerus yaitu :

- 1. Pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kepada usaha untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di bidang-bidang yang semakin meluas dalam masyarakat secara keseluruhan.
- 2. Pemerataan, dalam kaitannya dengan pendapatan nasional tersebut sampai seberapa jauh hasil produksi nasional berada dalam jangkauan daya beli seberapa besar penduduk yang ingin membeli sejumlah hasil produksi guna memenuhi kehidupannya.
- 3. Stabilitas nasional, kebijaksanaan pembangunan yang menuju pada dua sasaran kembar diatas tadi memerlukan suasana kehidupan masyarakat yang stabil yang merupakan syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontiniu (Zulkarnain Djamin, 1995:9-10).

Menurut Hadi Prayitno (1987:8), masalah pokok dalam pembangunan pedesaan terletak pada 3 hal yaitu :

- 1. Potensi sumber-sumber alam belum dikelola secara optimal
- 2. Mutu tenaga kerja rendah
- 3. Sikap manusia dan fungsi kelembagaan di pedesaan belum sejalan dengan gerak pembangunan.

Kunarjo dalam Zulkarnain Djamin (1995:156) mengatakan bahwa pembangunan daerah adalah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi

berbagai sumber pembiayaan. Baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Sedangkan pembangunan masyarakat desa yaitu suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut (Zulkarnain Djamin,1995:1).

Talizi duhu Ndraha dalam Hadi Prayitno (1987:1) mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan dalam bahwa pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Terutama yang menyangkut potensi masyarakat dan daya dukung alamnya.

Soewignyo dalam Hadi Prayitno (1987:91) berpendapat bahwa dalam melaksanakan pembangunan desa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fisik desa meliputi pembangunan prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan prioritas-prioritas tertentu. Yang meliputi antara lain :

1. Tersedianya prasarana produksi
2. tersedianya prasarana perhubungan
3. tersedianya prasarana-prasaran
4. tersedianya prasarana social

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan suatu kebijakan pemerintah tentang bantuan dana bergulir, bantuan penyediaan sarana dan prasarana yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin, dimana tujuannya adalah untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat serta aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya ekonomi pedesaan. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan struktural maupun kultural dapat dilakukan secara simultan.

II.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama dan budaya. (Widjaja, 2001:169)

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal

ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan insitusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses yaitu :

1. akses terhadap sumber daya
2. akses terhadap teknologi
3. akses terhadap pasar
4. akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini, di samping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu "koperasi".

Kartasasmita dalam Sufian (2006:5) beragumentasi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Untuk meningkatkan sumber daya pedesaan dapat dilakukan empat pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan penyuluhan, berusaha merubah pertanian subsistensi menjadi suatu masyarakat yang dinamik dan meningkatkan suatu taraf hidup keluarga dan masyarakat.
2. Pendekatan pelatihan/pendidikan, pengajaran yang sistematis serta mendalam untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dasar tertentu.
3. Pendekatan swadaya terpadu, merubah watak, sikap penduduk terhadap pembaharuan dan hasrat mereka terhadap perbaikan nasib.
4. Pendekatan pembangunan terpadu, sifatnya beraneka ragam dan tegas dalam memilih metode pendidikannya. Suatu pandangan yang luas mengenai proses pembangunan dan cara mengkoordinasi dalam rangka satu sistem pengelolaan tunggal segala komponen penting.

Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Zulkarnain Djamin,2001:7), diantaranya :

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani terhadap potensi an pengembangan usahanya.
2. Melakukan program pembinaan yang kontiniu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program-program pendampingan.
3. Melaksanakn program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antara instansi yang terlibat dalam proses pembinaan baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar dan penerapan teknologi.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Menurut Zubaedi (2007:18) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling

menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

“Pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab (Ibid,19).

Program yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat, terlaksana apabila masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut. Sebagaimana dikatakan Wahyudi Sumpeno (dalam Mudiyono Dkk,2005:115-116) memberikan penegasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat agar pembangunan itu lebih memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan lebih terarah pada tujuan pengembangan masyarakat itu sendiri, yang ia ungkapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun dari pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumberdaya pendukung lebih banyak dimiliki individu, kelompok, atau organisasi masyarakat.
2. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dengan baik termasuk dalam tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama.
3. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja bersama dalam program-program pembangunan manakala mereka ikut bertanggung jawab di dalamnya.
4. Dalam kehidupan demokratis secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan dan harapan yang ingin dicapainya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping itu masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Dalam praktiknya, setiap pekerjaan membutuhkan organisasi yaitu sekumpulan orang-orang, pekerjaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain dan beberapa tahapan-tahapan tersebut bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian. Sebagaimana dikemukakan oleh Nickles, Mc Hugh (dalam Sule,2006:6) manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa tugas administrator negara semata-mata menjalankan kebijakan publik ternyata tidak relevan lagi. Karena dengan semakin besar tanggung jawab administratif dari administrator negara, maka selagi ia memainkan peran instrumental (melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus merumuskan kebijakan tersebut, maka ia juga akan memainkan peran politis). Indikator yang menunjukkan peran ini juga cukup banyak dengan kata lain

administrasi negara hakekatnya juga proses politik. Carl Frederick (dalam Thoha 2005: 61), mengatakan kebijakan adalah suatu tujuan, sasaran, atau keinginan.

Menurut Dye (dalam Islamy,2004:18), kebijaksanaan Negara adalah sebagai apapun yang diilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifitas) dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

James Anderson (dalam leo agustino,2006:7), memberikan defenisi kebijakan publik dalam bukunya “*public policy making*” sebagai berikut: serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran

menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.

3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho,2004:92).

Dunn (1995:49), mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah tindakan dalam rangka penerapan kebijakan yang dilakukan, adapun indikasinya adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan
- d. Penilaian

II.1.3 Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang terpenting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok kerja.

Titik tolak pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha atau dalam organisasi bersangkutan. Oleh karena petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip yang dapat merefleksikan pola organisasi. Ini berarti

bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada pola organisasi bersangkutan.

Setiap kebijakan tentu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tanpa ada pengawasan dan penilain (evaluasi) yang serius. Dimana tujuannya dari pengawasan dan penilaian (evaluasi) tersebut untu kesempurnaan pencapaian sasaran tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dalam hal ini Terry (dalam mukijat,2000:55), mengatakan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.

The Liang Gie (dalam mukijat 2000:57), juga mengatakan pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, pemerintah petunjuk atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Adapun jenis-jenis pengawasan (Schermerhom,2001) adalah :

1. Pengawasan *Feedforward* (Umpan didepan)
 - a. Dilakukan sebelum aktivitas dimulai.
 - b. Dalam rangka menjamin : kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Memfokuskan pada kualitas sumber daya.
2. Pengawasan *Concurrent* (Bersamaan)
 - a. Memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan.
 - b. Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana.
 - c. Dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan.
3. Pengawasan *Feedback* (Umpan Balik)
 - a. Terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan.
 - b. Memfokuskan kepada kualitas dari hasil.
 - c. Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dimasa depan.

4. Pengawasan Internal & Eksternal
 - a. Pengawasan Internal yaitu memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri.
 - b. Pengawasan Eksternal yaitu terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal.

Pengawasan dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktu
Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan ialah perencanaan dan budget, sedangkan pengawasan secara represif menggunakan alat budget dan laporan.
2. Pengawasan dari segi obyek
Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan, pengawasan dari segi obyek merupakan pengawasan administrative dan pengawasan operatif. Contoh pengawasan administratif adalah pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan
3. Pengawasan dari segi subyek
Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.(Yayat M. Herujito,2004:243)

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengawasi langsung di tempat (*personal inspections*),
2. Melalui laporan lisan (*oral report*),
3. Melalui tulisan (*written report*),
4. Melalui penjagaan khusus (*control by exeption*). (*Ibid*:243)

Menurut Yayat M.Herujito (*Ibid*) adapun tolak ukur yang dipakai dalam pengawasan ialah sebagai berikut :

1. Tolak ukur dengan standard fisik (*physical standard*)
Tolak ukur dengan standard fisik memperhatikan tiga hal :
 - 1) Kualitas hasil produksi,
 - 2) Kuantitas hasil produksi,

- 3) Waktu penyelesaian.
2. Tolak ukur dengan standard non fisik, seperti hal-hal yang dapat dirasakan, tetapi tidak dapat dilihat dan dipakai (*intangible standard*).

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawsan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standard atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang banar-benar dapat efektif dilaksanakan.

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Berarti inti fungsi ini menyoroti apa yang sedang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional sedang berlangsung. Jika penyimpangan ditemukan, tindakan korektif dapat saja diambil sehingga dengan demikian organisasi kembali ke rel yang sebenarnya. Dengan kata lain sorotan perhatian manajemen dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan ialah membandingkan isi rencana dengan kinerja nyata.

II.1.4 Evaluasi

Siagian (dalam mukijat,2000:61), mengatakan penilaian (evaluasi) merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir yang mempunyai arti

proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil seharusnya dicapai.

Menurut Lubis (1985:150), evaluasi merupakan pembuatan kesimpulan atas dasar fakta dalam sebuah laporan yang mengarah pada:

- a. Sebab timbulnya penyimpangan terhadap rencana.
- b. Pengaruh ketimpangan itu terhadap pencapaian tujuan serta target keseluruhan.
- c. Pengaruh dari target bagian yang telah dicapai serta perkembangan baru dilapangan.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya. Menurut Anderson (dalam Islamy 1988:6), evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilai atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya.

Mengikuti William N. Dunn (1995), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) (dalam Riant Nugroho D, 2004:185). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi meberikan sumbang pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Jones (dalam Islamy, 2004:112), mengatakan penilaian kebijaksanaan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program

pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Dapat kita pahami disini, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Menurut Dunn (dalam Nugroho,2004:185), evaluasi dapat dilaksanakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan.

Evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi (Dunn,2000:167). Keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Nurkholis (2005:169), menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu.

Siagian berpendapat (dalam Riyadi dan Kusumah,2005:263), evaluasi merupakan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Maka menurut Nurcholis (2005:169), evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu.

Dengan evaluasi ini dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan dana simpan pinjam kelompok perempuan.

Dalam buku Ndraha yang berjudul *Kybernology* (ilmu pemerintahan baru) Evaluasi adalah Proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaiannya dan harapan suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan public harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan dan kinerja kebijakan.(Ibid)

Dengan melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditunjukkan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Menurut Suchman (dalam Nugroho,2004:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam mengevaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagai berikut : obyektifitas dan professional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, berbasis indikator kerja.(PTO PNPM Mandiri Perdesaan,2008:2).

1. Obyektif dan professional
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin. Informasi harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin keakurasinya. Informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dari sumber terpercaya yang dapat membantu untuk memperbaiki program.
2. Transparan
Pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Hasil pemantauan dan evaluasi harus diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.
3. Partisipatif
Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan harus bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.
4. Akuntabel
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara internal maupun eksternal.
5. Berorientasi Solusi

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.

6. Terintegrasi

Kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan konsultan maupun fasilitator harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Selain itu, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi oleh konsultan maupun fasilitator juga harus terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Konsultan maupun fasilitator tidak mungkin melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan di lapangan setiap saat sehingga peran masyarakat untuk memantau dan mengawasi program menjadi penting. Tim pemantauan/pengawasan dari masyarakat adalah mitra dan kepanjangan tangan konsultan dan fasilitator dalam melakukan monitoring dan evaluasi program di tingkat desa maupun kecamatan.

7. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program.

PPK/PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis yaitu pemantauan partisipasi oleh masyarakat, pemantauan oleh pemerintah, pemantauan oleh konsultan, mekanisme penanganan pengaduan dan masalah, pemantauan independent oleh LSM /jurnalis, kajian keuangan dan audit.

1. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat

Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek dilokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mengecek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan

bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan. Setiap Tim pelaksanaan kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum "musyawarah pertanggung jawaban". Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada papan informasi di setiap desa.

2. pemantauan oleh masyarakat

Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PJOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.

3. Pemantauan oleh konsultan

Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan fasilitator melakukan kunjungan rutin kelokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervise.

4. Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah

Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staf pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM)/langsung kepusat PPK/PNPM-Perdesaan membentuk unit penanganan pengaduan dan masalah ditingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.

5. Pemantauan *independent* oleh LSM/jurnalis

PPK/PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka dilapangan.

6. Kajian keuangan dan audit

Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program,yakni:

1. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit memiliki pemerintah, setiap tahun BPKP mengaudit 5% sample kegiatan program.
2. Unit pelatihan dan supervisi keuangan program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan / on-the-job training bagi unit pengelola keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaatan pinjaman ekonomi.
3. Misi supervisi bank dunia. Bank dunia bersama-sama konsultan manajemen nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan misi supervisi persemester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu

manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

4. Audit silang oleh pelaku PPK di desa/kecamatan. Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antar desa atau antar kecamatan. Baik antar desa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain atau antar kecamatan disatu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsisten pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman atau pelaku program.

Hasil pemantauan secara internal maupun eksternal merupakan bahan untuk evaluasi bagi pelaku program agar selanjutnya dapat melakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPK. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bias dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Tim internal ataupun eksternal bisa melakukan evaluasi dengan dibantu oleh staff program. Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku program di lapangan.

II.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menarik suatu hipotesisi sebagai berikut: “diduga pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo

belum berjalan dengan baik, ternyata dugaan saya salah” karena pada umumnya responden menilai bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PPK sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007.

II.3 Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,2003:38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah “ Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana. Dan yang menjadi indikator dalam variabel ini adalah evaluasi dan pembangunan.

Evaluasi yang menjadi subindikatornya (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2008:2) antara lain :

1. Obyektif dan professional
2. Transparan
3. Partisipatif
4. Akuntabel
5. Berorientasi Solusi
6. Terintegrasi
7. Berbasis indikator kinerja
8. Sumber daya
9. Tahapan dalam pelaksanaan pembangunan
10. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
11. Dana yang dipergunakan
12. Tujuan umum dari program pembangunan.

Sedangkan Tolak Ukur Pembangunan (Arif Budiman,2000:4) yang menjadi subindikatornya antara lain :

1. Kekayaan Rata-rata
2. Pemerataan
3. Kualitas Kehidupan
4. Keseimbangan/kerusakan lingkungan
5. Kesiambungan
6. Hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
7. Pembangunan mendukung kelancaran ekonomi masyarakat
8. Pembangunan melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif
9. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

II.4 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pemahaman terhadap penafsiran konsep-konsep yang terdapat dalam tulisan ini, maka penulis membentuk konsep operasionalnya sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program yang dirancang dengan pendekatan yang lebih konprehensif dengan titik tekan pada upaya pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan musyawarah, dimana prioritas utama PPK adalah masyarakat miskin/kurang mampu sehingga dengan dana PPK ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang mana tujuan dari PPK membantu pemerinth daerah

dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipatif dengan memperkuat kemampuan kecamatan dan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan.

2. Secara umum tujuan pembangunan prasarana dan sarana adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa, serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Secara khusus tujuannya adalah untuk membangun prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan, diperuntukkan :

- a. Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin.
- b. Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana.
- d. Meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Pemeliharaan Prasarana, dalam pengelolaan kegiatan.
- e. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.

3. Dalam Sarana dan Prasarana dalam hal ini, infrastuktur yang dimaksud adalah dalam penelitian ini khusus pada sarana dan prasarana segala kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di desa Karya Mulya. Yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut.

4. Prasarana untuk mendukung pemerataan pembangunan fisik (*infrastruktur*) di masyarakat dalam penelitian ini adalah tujuannya untuk kelancaran aktivitas masyarakat baik itu dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.
5. Pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem atau sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
6. pembangunan masyarakat desa yaitu suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
7. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
9. Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.

10. Evaluasi adalah suatu proses berdasarkan pada disiplin ketat dan tahapan waktu, untuk mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan.
11. Transparan maksudnya seluruh operasional kegiatan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas.
12. Partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana.

II.5 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), studi kasus terhadap program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi, yang menjadi subindikatornya yaitu : obyektifitas dan professional, transparansi, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, berbasis indikator kerja, sumber daya, tahapan dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dana yang digunakan, tujuan umum program pembangunan.

Dengan Pengukuran :

Sangat Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai evaluasi dari program pembangunan sarana dan prasarana sangat sesuai.

Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai evaluasi dari program pembangunan sarana dan prasarana sesuai.

Cukup sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai evaluasi dari program pembangunan sarana dan prasarana cukup sesuai.

Kurang sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai evaluasi dari program pembangunan sarana dan prasarana kurang sesuai.

Belum sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai evaluasi dari program pembangunan sarana dan prasarana belum sesuai.

2. Pembangunan, yang menjadi subindikatornya yaitu : Kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, keseimbangan, kesinambungan, hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan mendukung kelancaran ekonomi masyarakat, pembangunan melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan Pengukuran :

Sangat Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai pembangunan dari program pembangunan sarana dan prasarana sangat sesuai.

- Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai pembangunan dari program pembangunan sarana dan prasarana sesuai.
- Cukup sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai pembangunan dari program pembangunan sarana dan prasarana cukup sesuai.
- Kurang sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai pembangunan dari program pembangunan sarana dan prasarana kurang sesuai.
- Belum sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai pembangunan dari program pembangunan sarana dan prasarana belum sesuai.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena. (Sugiyono, 2003:9)

Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan *feedback* dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang dan jasa.

III.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pertimbangan penulis memilih Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada, karena di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo belum terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) secara maksimal, menyeluruh dan merata bagi kepentingan masyarakat. Maka untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan kecamatan

(PPK) di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dalam program pembangunan sarana dan prasarana.

Waktu penelitian ini dimulai semenjak bulan Januari tanggal 1 sampai dengan 30 Maret 2010.

III.3 Jenis dan Sumber Data

III.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tentunya yang berkaitan Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana, yang diantaranya:

1. Jawaban responden terhadap kuesioner
2. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara
3. Dan sebagainya.

III.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan

proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Karya Mulya Kecamatan Ramah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun data, yang diperoleh meliputi :

1. Letak Geografis Kecamatan Rambah Samo,
2. Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2009
3. Sejarah Desa Karya Mulya,
4. Visi dan Misi desa Karya Mulya,
5. Kelembagaan Desa Karya Mulya,
6. Monografi Desa Karya Mulya,
7. Penjelasan tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya dalam program pembangunan sarana dan prasarana,
8. Pelaku PPK Tingkat Kecamatan,
9. Pelaku PPK Tingkat Desa

III.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005:90).

Sedangkan sampel menurut Sugiono (2005:91) adalah Bagian Dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi penelitian ini adalah pelaku PPK tingkat kecamatan dan tingkat Desa, dengan jumlah anggotanya 53 orang. Karena terbatasnya jumlah populasi maka

semua populasi dijadikan sebagai sampel, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu orang-orang yang mengetahui tentang objek penelitian, yaitu mengenai Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tabel III.1 Pelaku PPK Tingkat Kecamatan

No	Pelaku PPK	Anggota
1.	Camat	1 Orang
2.	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PTOK)	1 Orang
3.	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	3 Orang
4.	Tim Verifikasi (TV)	5 Orang
5.	Tim Pengamat	1 Orang
6.	Pendamping Lokal (PL)	1 Orang
7.	Fasilitator Kecamatan (FK)	2 Orang
8.	Setrawan Kecamatan	1 Orang
9.	Badan Pengawas UPK (BP-UPK)	3 Orang
10.	Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	3 Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber : Kantor Kec. Rambah Samo, 2009

Dari table III.1 diatas, terlihat bahwa pelaku PPK tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PTOK),Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal (PL),

Fasilitator Kecamatan (FK), Setrawan Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) angotanya sebanyak 21 orang.

Tabel III.2 Pelaku PPK Tingkat Desa

No	Pelaku PPK	Anggota
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5 Orang
3.	Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK)	3 Orang
4.	Tim Penulis Usulan (TPU)	3 Orang
5.	Tim Pemantau	18 Orang
6.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMMD)	2 Orang
.Jumlah		32 Orang

Sumber : Kantor Kec. Rambah Samo, 2009

Dari tabel III.2 diatas, terlihat bahwa pelaku PPK tingkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMMD), anggotanya sebanyak 32 Orang.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

III.5.1 Kuisisioner (Angket)

Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden mengenai Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), khususnya pada program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu..

III.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner.

III.5.3 Observasi

Observasi adalah penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung (Walgito, 1987:54). Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

III.6 Analisis Data

Penelitian ini berbentuk statistik deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang belaku untuk umum atau generalisasi.(Sugiyono,2003:169).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV. 1. Gambaran Umum Kecamatan Rambah Samo

Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah kurang lebih 295,14 Km² atau 29.514 Ha, mempunyai 14 Desa dengan pusat pemerintah berda di dusun Danau Sati Desa Rambah Samo.

Pada tahun 2007 Penduduk Kecamatan Rambah Samo Mempunyai penduduk sebanyak 25.533 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 87 jiwa / Km².

Dilihat dari bentangan wilyah, Kecamatan Rambah Samo berbatasan dengan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Kepenuhan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Kunto Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah

Tabel IV.1. Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2009

No	Desa/Kelurahan	Pamong Desa	RW	RT
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rambah Samo Barat	5	10	25
2.	Marga Mulya	4	8	24
3.	Rambah Samo	3	6	12
4.	Karya Mulya	3	7	25
5.	Rambah Baru	2	4	20
6.	Rambah Utama	3	8	26
7.	Pasir Makmur	2	4	12
8	Masda Makmur	3	6	12
.9.	Langkitin	3	6	12
10.	Lubuk Napal	3	6	12
11.	Teluk Aur	3	6	13
12.	Sungai Salak	3	6	12
13.	Sungai Kuning	3	6	12
14.	Lubuk Bilang	3	6	12
Jumlah 2009		116	89	228

Sumber : Kantor Kec. Rambah Samo, 2009

Dari tabel IV.1 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Rambah Samo terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa, dengan jumlah 116 Pamong Desa, 89 Rukun Warga (RW) dan 228 Rukun Tetangga (RT).

IV.2. Gambaran Umum Desa Karya Mulya

IV.2.1 Sejarah Desa Karya Mulya

Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokah Hulu, Provinsi Riau, berdiri dengan adanya program Transmigrasi yang ditempatkan pada tanggal 1 September 1980 yang gunanya pemerataan penduduk, serta meningkatkan taraf hidup dan pembangunan di Indonesia dengan tujuan / sasaran swasembada bangsa.

Desa Karya Mulya yang sebelumnya adalah bernama Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. DK I.B
2. DK II.B
3. DU. B

Yang dipimpin oleh Kepala Inti Pemukiman Transmigrasi (KPUT) dan Kepala Satuan Pemukiman Transmigrasi (KSPT) yang ibina selama 5 (lima) tahun.

Pada tahun 1985 dari Transmigrasi diserahkan ke PEMDA dan menjadi Devinitif dengan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara demokrasi dan resmi menjadi desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupeten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan luas wilayah 3.10 Ha, terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu :

1. Tadinya DU.B sekarang menjadi Dusun I Banjarsari.
2. Tadinya DK.I.B sekarang menjadi Dusun II Karya Mukti.
3. Tadinya DK.II.B sekarang menjadi Dusun III Summersari.

Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah yang mana Kabupaten Kampar terbagi bersama dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak lama berselang waktu dengan adanya pemekaran kecamatan yang mana Kecamatan Rambah Samo yang terdiri dari 14 (empat belas) desa yaitu :

1. Desa Rambah Samo,
2. Desa Langkitin,
3. Desa Rambah Samo Barat,
4. Desa Marga Mulya,
5. Desa Rambah Baru,
6. Desa Rambah Utama,
7. Desa Masda Makmur,
8. Desa Pasir Makmur,
9. Desa Lubuk Napal,
10. Desa Teluk Aur,
11. Desa Sugai Salak,
12. Desa Sungai Kuning,
13. Desa Lubuk Bilang,

mulai sejak itulah Desa Karya Mulya termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau hingga sekarang.

IV.2.2 Visi dan Misi Desa Karya Mulya

Adapun visi dan misi desa Karya Mulya ditahun 2013 adalah terwujudnya masyarakat yang handal dalam perekonomian yang ditunjang oleh sektor pertanian berupa pangan, perkebunan, serta peternakan merupakan produk atau komoditi unggulan di desa Karya Mulya sehingga mampu bersaing dimasa yang akan datang sehingga terciptanya masyarakat Desa Karya Mulya , masyarakat yang sehat, sejahtera, aman, damai juga beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, serta mempunyai ilmu pengetahuan yang layak serta penuh disiplin dalam melaksanakan dan mentaati kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengedepankan kesatuan dan persatuan, sadar bergotong royong serta menghormati adapt istiadat dan budaya yang ada, berdasarkan kepada pancasila dan Undang-undang 1945.

IV.2.3 Kelembagaan Desa Karya Mulya

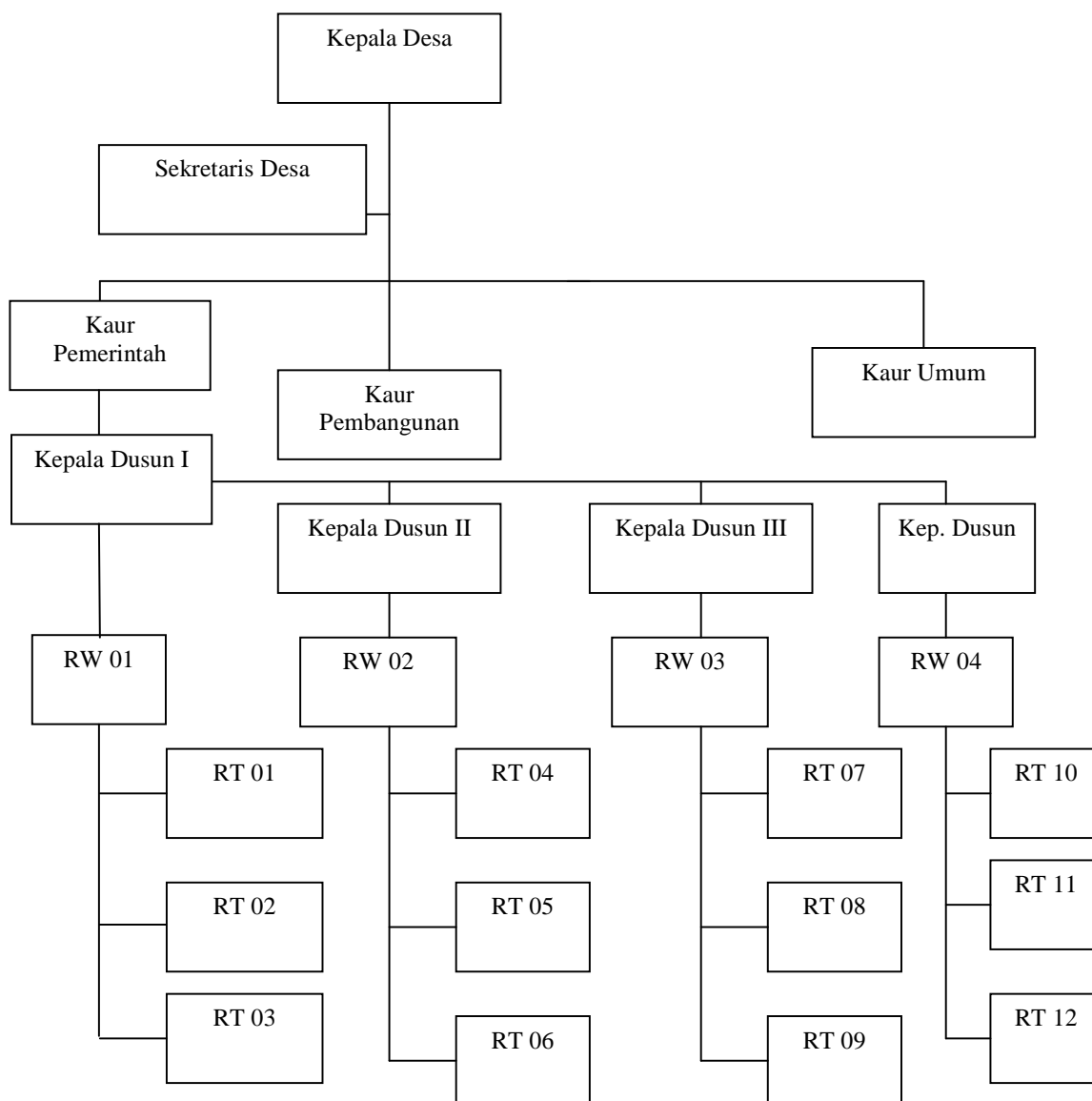
Didalam pemerintahan desa Karya Mulya dipimpin oleh kepala desa dan di Bantu oleh perangkat desa dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun jumlah kepengurusannya kelembagaan desa yang ada yaitu :

- Jumlah pengurusan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) wakil ketua, 3 (tiga) orang anggota.

- Jumlah pengurus LPM terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 8 (delapan) orang anggota.
- Jumlah Tim Penggerak Pkk 1 (satu) orang.
- Jumlah kader PKK 16 orang.

Adapun struktur pemerintah desa Karya Mulya sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karya Mulya



Sumber : Kantor Desa Karya Mulya, 2009.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa :

- a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretaris Desa :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf di bidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin sekretaris Desa.
- b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

- c. Fungsinya melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Urusan :
- a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.
 - b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Dusun :
- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
 - b. Bertugas melaksanakan pemerintahan Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa wilayah kerjanya.
 - c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

IV.2.4 Monografi Desa Karya Mulya

IV.2.4.1 Kependudukan

Secara Administrasi Desa Karya Mulya terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 7 (tujuh) RW, 25 (dua puluh lima) RT yang menempati luas areal 3.100 Ha. Penduduk Desa

Karya Mulya mayoritas berasal dari suku jawa 90% dan 85% beragama islam dan pekerjaannya 90% petani selebihnya PNS dan Buruh.

IV.2.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2009

Penduduk Desa Karya Mulya dilihat dari Gender tahun 2009 sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Karya Mulya Berdasarkan Gender Tahun 2009

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2009			Jumlah
	1	2	3	
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga	
1	1.358 Jiwa	1.265 Jiwa	668 KK	2.623 Jiwa

Sumber : *Kantor Kepala Desa Karya Mulya, 2009.*

Dari tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana jumlah laki-laki 1.358 jiwa sedangkan jumlah perempuan hanya 1.265 jiwa saja. Dan jumlah Kepala Keluarga ada 668 KK.

IV.2.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu maka dapat dibagi kepada 13 (Tiga Belas) tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini:

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Karya Mulya.

No	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60 >	
1	177	227	234	260	255	261	231	220	189	148	157	144	110	2.623

Sumber : Kantor Kepala Desa Karya Mulya, 2009.

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Karya Mulya adalah dewasa yang berumur 25 sampai 29 tahun yaitu 261 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 110 orang.

IV.2.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu maka dapat dibagi kepada 9 (Sembilan) tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Buta Huruf	Tamat Paud	Tamat TK	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D I	Tamat D II	Tamat S I	
1	37	24	21	1.087	254	225	12	6	2	2.623

Sumber : Kantor Kepala Desa Karya Mulya, 2009.

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Karya Mulya dilihat dari tingkat pendidikannya adalah tamatan SD yaitu sebanyak 1.087 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah tamatan S I yaitu hanya 2 orang.

IV.3 Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Harapan dari sebuah program pemberdayaan adalah keberhasilan yang dirasakan bagi masyarakat sasaran tanpa memberikan gejolak sosial yang berarti. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selalu mempunyai dua sisi pengaruh, yakni terwujudnya tatanan ideal program atau masyarakat yang terstruktur dan kenyataan yang berbeda dari tujuan program atau konflik-konflik sebagai ciri dari masyarakat yang dinamis.

Pelaksanaan PPK ini dapat menggambarkan tentang bagaimana sistem sosial dalam masyarakat tersebut akan dibangun. Dari hal tersebut jelas membuktikan, bahwa kesertaan secara individual pengurus desa terlibat secara langsung dalam kepengurusan kelembagaan PPK adalah sebagai usaha untuk menciptakan sistem sosial baru yang fungsional melalui kelembagaan baru PPK. Ada semacam anggapan, kelembagaan baru ini akan lebih fungsional apabila dikelola oleh orang-orang yang

berpengalaman dalam kepengurusan di kelembagaan formal. PPK memusatkan kegiatan pada masyarakat paling miskin di perdesaan di tanah air. PPK merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini. Terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya.

Program berupaya meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antardesa melalui berbagai jenis pelatihan. Program menyediakan dana stimulan untuk pengadaan sarana dan prasarana dasar perdesaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat miskin, paling prioritas dan mendesak; serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui PPK, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada upaya pemeliharannya. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana, pinjaman modal usaha dan simpan pinjam, atau kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, PPK memberikan dana bantuan langsung (BLM) kepada masyarakat dan bantuan teknis berupa konsultan atau fasilitator.

Ada beberapa ketentuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan PPK, diantaranya open menu, maksudnya PPK sangat terbuka menerima usulan kegiatan masyarakat untuk didanai. Namun hanya usulan yang menguntungkan, melibatkan banyak masyarakat miskin dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, yang mendapat

prioritas utama pendanaan. PPK menghindari jenis kegiatan yang dilarang (negative list).

Ketentuan dasar lainnya adalah proses kompetisi dalam penentuan usulan kegiatan yang akan didanai PPK. Proses ini harus didasari prinsip-prinsip keterlibatan orang miskin dan keberpihakan pada kaum perempuan. Aspek-aspek seperti tingkat swadaya masyarakat, pelestarian kegiatan, dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran atas ketentuan PPK, juga menjadi landasan penting.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Identitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan, terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian yang terlibat langsung dalam kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau sekarang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana (fisik). Untuk jelasnya, selagi akan diuraikan.

Responden penelitian ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah responden ditinjau dari jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:

Tabel. V.1 : Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	36	67,92%
2	Perempuan	17	32,08%
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yakni 36 orang atau 67,92% untuk yang pertama dan 17 orang atau 32,08% untuk yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan PPK/PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Karya Mulya belum cukup memadai, karena belum hampir setengah dari anggotanya merupakan kaum perempuan.

Responden di atas, juga memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel. V.2 : Tingkat Pendidikan Responden

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	-
2	SLTP	14	26,42%
3	SLTA	32	60,38%
4	S1	7	13,2%
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Menurut tabel V.2 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden bisa dikatakan tinggi karena sebagian besar responden adalah tamatan SLTA (60,38%), tamatan SLTP (26,42%) dan Perguruan Tinggi (13,2%), sedangkan yang mempunyai pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) tidak ada sama sekali.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan responden, perbedaan juga terjadi pada masa lamanya responden menjadi anggota PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Karya Mulya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini:

Tabel. V.3 : Masa responden menjadi anggota PPK/PNPM Mandiri Perdesaan

NO	Kelompok Masa	Jumlah	Persentase (%)
1	1 tahun	13	24,52%
2	2 tahun	14	26,42%
3	3 tahun	10	18,87%
4	4 tahun	6	11,32%
5	5 tahun keatas	10	18,87%
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.3 di atas dapat dilihat bahwa masa responden menjadi anggota PPK/PNPM Mandiri Perdesaan sudah cukup lama, dimana hanya ada beberapa orang saja responden yakni 14 orang atau 24,52% yang menjadi anggota pada kelompok masa pertama, sedangkan yang lainnya sudah menjadi anggota lebih dari 1 (satu) tahun ke atas.

V.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK) studi kasus terhadap program pembangunan sarana dan prasarana (fisik) di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Prinsip Evaluasi
2. Tolak Ukur Pembangunan

Berdasarkan hal demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan satu-persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan responden terhadap pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana (fisik) yang dilaksanakan di Desa

Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, baik itu dengan menjawab kuesioner yang telah disebarakan maupun jawaban-jawaban responden sewaktu wawancara.

V.2.1. Prinsip Evaluasi

Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi, dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan evaluasi antara lain : obyektifitas dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, dan berbasis indikator kinerja yang terdiri dari indikator input, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator dampak. (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2-3)

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan Prinsip evaluasi dalam program pembangunan di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel V.4 di bawah ini:

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Obyektifitas dan Professional.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	49	92,46%
3	Cukup Sesuai	4	7,54%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 49 orang atau 92,46% sesuai terhadap Prinsip Obyektifitas dan Professional, dimana pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin berdasarkan fakta dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya. Sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai Prinsip Obyektifitas dan Professional yang pertama ini kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip Obyektifitas dan Professional sudah berjalan, dimana pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin berdasarkan fakta dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden yaitu 49 orang atau 92,46% memberi penilaian sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip transparan, dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya diketahui oleh semua pihak dapat dilihat pada tabel V.5 berikut:

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Transparan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	23	43,4%
3	Cukup Sesuai	2	3,77%
4	Kurang Sesuai	28	52,83%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 28 orang atau 52,83% kurang sesuai tentang prinsip transparan.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan kurang sesuai, dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya belum diketahui oleh semua pihak. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (52,83%) menilai prinsip transparan kurang sesuai.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada ketua UPK Rambah Samo Bapak Wardoyo, beliau mengatakan:

”Bahwasannya masyarakat kurang mengerti terhadap prinsip transparan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebebasan berbicara, dan bersifat terbuka untuk menerima informasi yang baik ataupun yang buruk, penghargaan maupun kritikan belum tercapai, karena yang seharusnya evaluasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab dan hasil dari evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tersebut harus diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut, belum bisa terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip partisipatif, dimana semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.6 berikut:

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Partisipatif.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	1	1,89%
2	Sesuai	18	33,97%
3	Cukup Sesuai	11	20,76%
4	Kurang Sesuai	23	43,38%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 23 orang atau 43,38% kurang sesuai dengan prinsip partisipatif dimana semua pelaku program belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipatif kurang sesuai, dimana semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (43,38%) menilai prinsip Partisipatif kurang sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian ketua TPK Desa Karya Mulya Bapak Miyanto, yaitu:

”Bahwa kita tidak perlu berfikir bagaimana masalah itu bisa muncul dilapangan, tetapi kita harus bisa berfikir untuk melakukan tindakan perbaikan.

Dari wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa belum semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan

kontribusinya untuk perbaikan program. Dan apabila terjadi masalah di lapangan para pelaku program menjadi lebih sadar tentang masalah tersebut dan dapat belajar dari masalah itu, dan melakukan langkah perbaikan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Akuntabel.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	3	5,66%
2	Sesuai	46	86,80%
3	Cukup Sesuai	4	7,54%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 46 orang atau 86,80% sesuai dengan prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal, bahkan ada yang sangat sesuai yakni 3 orang atau 5,66%. Namun sebaliknya masih ada responden yakni 4 orang atau 7,54% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya sudah dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (86,80%) menilai prinsip akuntabel sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.8 berikut:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berorientasi Solusi.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	50	94,34%
3	Cukup Sesuai	3	5,66%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 50 orang atau 94,34% sesuai dengan prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 3 orang atau 5,66% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (94,34%) menilai prinsip berorientasi solusi sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip terintegrasi, dimana adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Karya Mulya, dapat dilihat pada tabel V.9 berikut:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Terintegrasi.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	38	71,70%
3	Cukup Sesuai	15	28,30%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 38 orang atau 71,70% sesuai dengan prinsip terintegrasi dimana adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 15 orang atau 28,30% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya diketahui oleh semua pihak. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (96,22%) menilai prinsip terintegrasi sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip berbasis indikator kinerja, dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.10 berikut:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berbasis Indikator Kinerja.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	3	5,66%
2	Sesuai	36	67,92%
3	Cukup Sesuai	14	26,42%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 36 orang atau 67,92% sesuai dengan prinsip berbasis indikator kinerja dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan ada yang sangat sesuai yakni 3 orang atau 5,66% namun sebaliknya masih ada responden yakni 14 orang atau 26,42% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip berbasis indikator kinerja dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (67,92%) menilai prinsip berbasis indikator kinerja sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.11 berikut:

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Jumlah Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan Program Pembangunan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	39	73,58%
3	Cukup Sesuai	11	20,76%
4	Kurang Sesuai	3	5,66%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.11 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 39 orang atau 73,58% sesuai dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 11 orang atau 20,76% yang cukup sesuai, bahkan ada responden yakni 3 orang atau 5,66% yang kurang sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (73,58%) menilai jumlah sumber daya sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.12 berikut:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Tahapan Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	44	83,02%
3	Cukup Sesuai	9	16,98%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.12 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 44 orang atau 83,02% sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan pembangunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 9 orang atau 16,98% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (83,02%) menilai tahapan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.13 berikut:

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	3	5,66%
2	Sesuai	43	81,13%
3	Cukup Sesuai	7	13,21%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.13 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 43 orang atau 81,13% sesuai dengan perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, bahkan ada responden yakni 3 orang atau 5,66% yang sangat sesuai. Namun sebaliknya masih ada responden yaitu 7 orang atau 13,21% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (81,13%) menilai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.14 berikut:

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Tentang Dana Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	1	1,89%
2	Sesuai	41	77,35%
3	Cukup Sesuai	11	20,76%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.14 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 41 orang atau 77,53% sudah sesuai mengenai dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya sudah sesuai. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (77,35%) menilai dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan sudah sesuai.

Menanggapi hal ini, ketua UPK Kecamatan Rambah Samo memberi penjelasan tentang dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan:

”Bahwasannya setiap pelaksanaan pembangunan sudah ada rencana anggarannya (RAB) yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tujuan umum dari program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya, dimana dapat meningkatnya pengembangan kemandirian masyarakat dapat dilihat pada tabel V.15 berikut:

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Umum Pembangunan Dimana Meningkatnya Pengembangan Kemandirian Masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	47	88,68%
3	Cukup Sesuai	6	11,32%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.15 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 47 orang atau 88,68% sesuai dengan tujuan umum pembangunan dimana meningkatnya pengembangan kemandirian masyarakat, namun sebaliknya masih ada responden yakni 6 orang atau 11,32% yang cukup sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dimana meningkatnya pengembangan kemandirian masyarakat. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (88,68%) menilai tujuan umum program pembangunan sudah sesuai.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan prinsip evaluasi secara keseluruhan di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.16 berikut:

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Prinsip-Prinsip Evaluasi

No	Sub	Pengukuran					Jumlah
	Indikator	SS	S	CS	KS	BS	
1	Prinsip Obyektifitas dan Professional	-	49	4	-	-	53
		-	92,46%	7,54%	-	-	100%
2	Prinsip Transparan	-	23	2	28	-	53
		-	43,4%	3,77%	53,83%	-	100%
3	Prinsip Partisipatif	1	18	11	23	-	53
		1,89%	33,97%	20,76 %	43,38%	-	100%
4	Prinsip Akuntabel	3	46	4	-	-	53
		5,66%	86,80%	7,54%	-	-	100%
5	Prinsip Berorientasi Solusi	-	50	3	-	-	53
		-	94,34%	5,66%	-	-	100%
6	Prinsip Terintegrasi	-	38	15	-	-	53
		-	71,70%	28,30 %	-	-	100%
7	Prinsip Indikator Kinerja	3	36	14	-	-	53
		5,66%	67,92%	26,42 %	-	-	100%
8	Jumlah Sumber Daya	-	39	11	3	-	53
		-	73,58%	20,76 %	5,66%	-	100%
9	Tahapan Dalam Pelaksanaan Pembangunan	-	44	9	-	-	53
		-	83,02%	16,98 %	-	-	100%
10	Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan	3	43	7	-	-	53
		5,66%	81,13%	13,21 %	-	-	100%
11	Dana Yang Dipergunakan	1	41	11	-	-	53
		1,89%	77,35%	20,76 %	-	-	100%
12	Tujuan Umum Program Pembangunan	-	47	6	-	-	53
		-	88,68%	11,32 %	-	-	100%
13	Total	11	474	97	54	-	636
		1,73%	74,53%	15,25 %	8,49%	-	100%
14	Rata-Rata	0,92	39,5	8,08	4,5	-	53
		1,73%	74,53%	15,25 %	8,49%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Keterangan:

SS : Sangat sesuai
S : Sesuai
CS : Cukup Sesuai
KS : Kurang Sesuai
BS : Belum Sesuai

Dari tabel V.16 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 74,53% menilai prinsip evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya sudah sesuai, bahkan ada responden yakni 1,73% yang menilai sangat sesuai. Namun ada responden yaitu 15,25% yang menilai cukup sesuai, bahkan ada responden yaitu 8,49% yang menilai kurang sesuai, sedangkan yang belum sesuai tidak ada sama sekali.

Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/PNPM Mandiri Perdesaan adalah sudah Sesuai berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu:

1. Pelaksanaan evaluasi sudah dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektifitas dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
2. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan di Desa Karya Mulya dapat mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Sehingga, hasil dari setiap pembangunan diketahui oleh semua pihak.
3. Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya.

4. Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Karya Mulya dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal.
5. Setiap pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
6. Adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
7. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
8. Sesuai jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya.
9. Sesuai tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
10. Sesuai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya.
11. Sesuai laporan rincian dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
12. Sesuai tujuan umum dari program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Namun masih ada yang kurang sesuai yaitu berkenaan dengan prinsip transparan dan prinsip partisipatif.

V.2.2. Tolak Ukur Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Cara pandang pembangunan ada 2 macam yaitu :

1. Dari fisiknya (materi),
2. Dari non fisik (SDM, SDA, Skill,Dll)

Dan yang menjadi tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah berhasil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kekayaan Rata-rata.
2. Pemeratan
3. Kualitas Kehidupan
4. Keseimbangan
5. Kesenambungan
6. Sesuainya hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat
7. Pembangunan mendukung kelancaran ekonomi masyarakat
8. Pembangunan yang dilaksanakan melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif
9. Setiap pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daerah bisa dikatakan berhasil yang pertama yaitu kekayaan rata-rata, dimana

pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Karya Mulya meningkat dapat dilihat pada tabel V.17 berikut:

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Tentang Kekayaan Rata-rata.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	42	79,42%
3	Cukup Sesuai	11	20,76%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*// cukup sesuai.

Hasil wawancara dengan Ketua TPK Desa Karya Mulya, Bapak Miyanto mengatakan "Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang betul-betul bermanfaat, sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat bisa meningkat".

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kekayaan rata-rata sudah Sesuai dengan ketentuannya, yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Karya Mulya. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 79,24% menilai sudah sesuai.

Setiap masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan kegiatan pembangunan, dimana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan permohonan tersebut terlebih dahulu diserahkan ke Tim Penulis Usulan (TPU) dan akan dibahas melalui forum Musyawarah Kelurahan untuk menentukan kegiatan tersebut diterima atau tidak. Bila sudah ditetapkan kegiatan diterima, maka kegiatan pembangunan yang diajukan tersebut akan menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap prinsip pemerataan yaitu pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dapat dilihat pada tabel V.18 berikut:

Tabel V.18 : Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Pemerataan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	7,54%
2	Sesuai	46	86,80%
3	Cukup Sesuai	3	5,66%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Menurut tabel V.18 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 46 orang atau 86,80% sudah sesuai bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan ada responden yaitu 4 orang atau 7,54% menilai sangat sesuai. Walaupun mayoritas responden sesuai dengan ketentuan yang demikian, masih terdapat 3 orang atau 5,66% responden yang menilai cukup sesuai.

Dari uraian tabel V.18 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang diusulkan merupakan pembangunan yang nantinya hasil dari pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga prinsip dari pemerataan tersebut bisa terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden (46 orang atau 86,80%) sudah sesuai terhadap ketentuan yang demikian.

Menurut Ketua TPK Desa Karya Mulya yaitu Bapak Miyanto, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, beliau berkata:

”Setiap usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat terlebih dahulu ditinjau oleh tim verifikasi, lalu diserahkan ke TPU Desa Karya Mulya kemudian usulan itu akan dibahas dalam musyawarah desa. Setiap desa berhak mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Di dalam musyawarah ini semua kegiatan pembangunan yang diajukan oleh setiap desa diadakan perengkingan, untuk memilih kegiatan pembangunan mana yang akan dilaksanakan, yang bertujuan supaya kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya merupakan pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan supaya pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat”.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Miyanto selaku Ketua TPK Desa Karya Mulya di atas, dapat diketahui bahwa, semua usulan kegiatan pembangunan yang masuk ke Lembaga PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Rambah Samo selalu diputuskan melalui forum musyawarah desa, supaya kegiatan pembangunan yang terpilih adalah benar-benar kegiatan pembangunan yang layak mendapat bantuan dana.

Berdasarkan survey lapangan, penulis melihat bahwasannya pembangunan yang ada Di Desa Karya Mulya pada umumnya telah dilaksanakan. Ini dapat dilihat dengan adanya bangunan yang telah didirikan seperti gedung MDA, TK, Posyandu, Perbaikan jalan maupun jembatan dan lain-lain. Dimana pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang lulus perengkingan artinya pemangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut.

Kemudian ketentuan kegiatan pembangunan yang selanjutnya yaitu pembangunan yang sesuai dengan prinsip kualitas kehidupan, dimana kesejahteraan masyarakat meningkat.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip kualitas kehidupan yaitu kesejahteraan masyarakat Desa Karya Mulya meningkat dapat dilihat pada tabel V.19 berikut:

Tabel V.19 : Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Kualitas Kehidupan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	42	79,24%
3	Cukup Sesuai	11	20,76%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.19 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yakni 42 orang atau 79,24% menilai tentang prinsip kualitas kehidupan, dimana kesejahteraan masyarakat meningkat sudah sesuai, namun sebaliknya masih ada yang cukup sesuai yaitu 11 orang atau 20,76%.

Menurut uraian tabel V.19 di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Karya Mulya sudah Sesuai, dimana tanggapan kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 79,24% menilai sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian ketua TPK Desa Karya Mulya Bapak Miyanto, yaitu:

”Setiap pembangunan yang dilaksanakan diharapkan bahwa nantinya hasil dari pembangunan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik.”

Seterusnya dalam kegiatan pembangunan yang akan diperhatikan lagi adalah tentang prinsip keseimbangan, dimana setiap pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan lingkungan sekitar.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prinsip keseimbangan yaitu setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya memperhatikan lingkungan sekitar dapat dilihat pada tabel V.20 berikut:

Tabel V.20 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Keseimbangan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	33	62,26%
3	Cukup Sesuai	18	33,97%
4	Kurang Sesuai	2	3,77%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.20 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 33 orang atau 62,26% sudah sesuai terhadap prinsip keseimbangan yaitu setiap pembangunan memperhatikan lingkungan sekitar, namun 18 orang atau 6.06% responden menilai masih cukup sesuai, bahkan ada 2 orang atau 3,77% responden menilai kurang sesuai.

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip keseimbangan, dimana setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya

sudah memperhatikan lingkungan sekitar, karena terdapat kebanyakan responden yaitu 33 orang atau 62,26% menilai sudah sesuai.

Sama halnya dengan penyampaian Bapak Miyanto ketika peneliti bertanya mengenai kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Desa Karya Mulya, beliau mengatakan:

”Bahwasannya setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Agar pembangunan yang akan dilaksanakan nanti tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar.

Ketentuan pembangunan yang berikutnya adalah prinsip kesinambungan, dimana setiap pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap prinsip kesinambungan yaitu setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel V.21 berikut:

Tabel V.21 : Tanggapan Responden Tentang Prinsip Kasinambungan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	43	81,13%
3	Cukup Sesuai	10	18,87%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.21 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 43 orang atau 81,13% sudah sesuai terhadap prinsip kesinambungan yaitu pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan, namun walaupun begitu, masih ada juga responden yang merasa cukup sesuai yaitu 10 orang atau 18,87%.

Menurut uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden 43 orang atau 81,13% sudah sesuai dengan ketentuan yang demikian.

Ketentuan pembangunan yang berikutnya adalah sesuainya hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap sesuainya hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Karya Mulya dapat dilihat pada tabel V.22 berikut:

Tabel V.22 : Tanggapan Responden Tentang Sesuanya Hasil Pembangunan Dengan Kebutuhan Masyarakat

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	1	1,89%
2	Sesuai	33	62,26%
3	Cukup Sesuai	17	32,08%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	2	3,77%
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.22 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 33 orang atau 62,26% menilai bahwa hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat sudah sesuai, ditambah dengan 1 orang responden atau 1,89% yang menilai sangat sesuai, namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 17 orang atau 32,08%, bahkan ada responden yakni 2 orang atau 3,77% yang menilai belum sesuai sama sekali.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Karya Mulya sudah sesuai. Hal ini terlihat dari 33 orang responden atau 62,26% menilai sudah sesuai.

Ketentuan pembangunan yang selanjutnya adalah setiap pembangunan yang akan dilaksanakan harus dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat, dapat dilihat pada tabel V.23 berikut:

Tabel V.23 : Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Dilaksanakan Dapat Mendukung Kelancaran Ekonomi.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	46	86,80%
3	Cukup Sesuai	7	13,2%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.22 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 46 orang atau 86,80% sudah sesuai terhadap pembangunan yang dilaksanakan harus dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat, namun walaupun begitu, masih ada juga responden yang merasa cukup sesuai yaitu 7 orang atau 13,2%.

Menurut uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden 46 orang atau 86,80% sudah sesuai dengan ketentuan yang demikian.

Ketentuan pembangunan yang selanjutnya adalah pembangunan yang dilaksanakan haruslah melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif, dapat dilihat pada tabel V.24 berikut:

Tabel V.24 : Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Melibatkan Semua Unsur Masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	44	83,02%
3	Cukup Sesuai	8	15,09%
4	Kurang Sesuai	1	1,89%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.24 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 44 orang atau 83,02% sudah sesuai terhadap pembangunan yang dilaksanakan melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif, meskipun demikian, masih ada juga responden yang merasa cukup sesuai yaitu 8 orang atau 15,09%, bahkan ada juga responden yakni 1 orang atau 1,89% yang menilai kurang sesuai.

Menurut uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden 44 orang atau 83,02% sudah sesuai seperti yang diharapkan.

Ketentuan pembangunan yang terakhir adalah setiap kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, dapat dilihat pada tabel V.25 berikut:

Tabel V.25 : Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Ditujukan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, Khususnya Masyarakat Kurang Mampu

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	45	84,91%
3	Cukup Sesuai	7	13,2%
4	Kurang Sesuai	1	1,89%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		53	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.25 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 45 orang atau 84,91% sudah sesuai terhadap pembangunan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, namun walaupun begitu, masih ada juga responden yang merasa cukup sesuai yaitu 7 orang atau 13,2%, selain itu ada juga responden yakni 1 orang atau 1,89% menyatakan kurang sesuai.

Menurut uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden yakni 45 orang atau 84,91% sudah sesuai dengan ketentuan yang demikian.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya, dapat dilihat pada tabel V.26 berikut:

Tabel V.26 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Dilaksanakan Di Desa Karya Mulya.

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1.	Kekayaan Rata-rat	-	42	11	-	-	53
		-	79,24%	20,76%	-	-	100%
2.	Pemerataan	4	46	3	-	-	53
		7,54%	86,80%	5,66%	-	-	100%
3.	Kualitas Kehidupan	-	42	11	-	-	53
		-	79,24%	20,76%	-	-	100%
4.	Keseimbangan	-	33	18	2	-	53
		-	62,26%	33,97%	3,77%	-	100%
5.	Kesinambungan	-	43	10	-	-	53
		-	81,13%	18,87%	-	-	100%
6.	Sesuai nya Hasil Pembangunan Dengan Kebutuhan Masyarakat	1	33	17	-	2	53
		1,89%	62,26%	32,08%	-	3,77%	100%
7.	Pembangunan Dapat Mendukung Kelancaran Ekonomi Masyarakat	-	46	7	-	-	53
		-	86,80%	13,2%	-	-	100%
8.	Pembangunan Yang Dilaksanakan Melibatkan Semua Unsur Masyarakat Secara Aktif	-	44	8	1	-	53
		-	83,02%	15,09%	1,89%	-	100%
9.	Kegiatan Pembangunan Ditujukan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, Khususnya Masyarakat Kurang Manpu	-	45	7	1	-	53
		-	84,91%	13,2%	1,89%	-	100%
10.	Total	5	374	92	4	2	477
		1,06%	78,41%	19,29%	0,83%	0,41%	100%
11.	Rata-Rata	0,56	41,56	10,22	0,44	0,22	53
		1,06%	78,41%	19,29%	0,83%	0,41%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.26 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 78,41% menilai seluruh ketentuan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya berada pada katagori sesuai, bahkan ada juga beberapa responden yang menyatakan sangat sesuai yaitu 1,06%. Namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 19,29%, bahkan ada juga responden yang menilai cukup sesuai yaitu 0,83% ada juga yang menyataka belum sesuai sama sekali yakni 0,41%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya sudah sesuai dengan tolak ukur bahwa pembangunan disuatu daeran berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.26 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 78,41% sudah sesuai terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Karya Mulya.

V.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Fisik) Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari:

1. Tanggapan responden terhadap prinsip evaluasi yaitu:

- 1) Obyektif dan Profesional,
- 2) Transparan,
- 3) Partisipatif,

- 4) Akuntabel,
 - 5) Berorientasi Solusi,
 - 6) Terintegrasi,
 - 7) Berbasis Indikator Kinerja,
 - 8) Indikator Input (mengukur jumlah sumber daya),
 - 9) Indikator Proses (tahapan),
 - 10) Indikator Keluaran/output (perencanaan dan pelaksanaan kegiatan),
 - 11) Indikator Hasil (dana yang dipergunakan),
 - 12) Indikator Dampak (pencapaian tujuan umum).
2. Tanggapan responden terhadap tolak ukur pembangunan yaitu:
- 1) Kekayaan Rata-Rata,
 - 2) Pemerataan,
 - 3) Kualitas Kehidupan,
 - 4) Keseimbangan,
 - 5) Kesiambungan,
 - 6) Sesuainya Hasil Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat,
 - 7) Pembangunan Mendukung Kelancaran Ekonomi Masyarakat,
 - 8) Pembangunan Melibatkan Semua Unsur Masyarakat Secara Aktif,
 - 9) Setiap Kegiatan Pembangunan Ditujukan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, Khususnya Masyarakat Kurang Mampu.

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi jawaban responden tentang Evaluasi PPK Program Pembangunan di bawah ini.

Tabel V.27 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi PPK Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Karya Mulya.

NO	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Prinsip Evaluasi	11	474	97	54	-	636
		1,73%	74,53%	15,25%	8,49%	-	100%
2	Tolak Ukur Pembangunan	5	374	92	4	2	477
		1,06%	78,41%	19,29%	0,83%	0,41%	100%
Total		16	848	189	58	2	1113
		1,44%	76,19%	16,98%	5,21%	0,18%	100%
Rata-Rata		0,76	40,38	9	2,76	0,1	53
		1,44%	76,19%	16,98%	5,21%	0,18%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010*

Dari tabel V.27 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, ternyata kebanyakan responden yaitu 76,19% menilai sudah sesuai, bahkan ada juga responden yaitu 1,44% menilai sangat sesuai, namun masih ada responden yang menilai cukup sesuai yaitu 16,98%, bahkan ada responden yang kurang sesuai yaitu 5,21%, ada juga yang menilai belum sesuai sama sekali yakni 0,18%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana (fisik) Di Desa Karya Mulya Kecamatan

Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, kebanyakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PPK berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007.

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan tabel V.27 sebelumnya, Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Studi Kasus Terhadap Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) studi kasus terhadap program pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PPK berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007. Hal ini dapat dilihat dari:
 - 1) Prinsip Evaluasi, dimana pelaksanaan evaluasi sudah dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektifitas dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan di Desa Karya Mulya juga dapat mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Sehingga, hasil dari setiap pembangunan diketahui oleh semua pihak. Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan

konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya. Pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal. Setiap pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Hal ini karna adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya. Selain itu pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya, semua ini dikarenakan :

- a) Sesuaianya jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya.
- b) Sesuaianya tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
- c) Sesuaianya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya.
- d) Adanya laporan rincian dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya.
- e) Sesuaianya tujuan umum dari program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

2) Tolak Ukur Pembangunan, dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah :

- a) Kekayaan Rata-rata, dengan adanya pembangunan tersebut pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Karya Mulya meningkat.
- b) Pemeratan, dimana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya Dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
- c) Kualitas Kehidupan, dimana kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya semakin meningkat.
- d) Keseimbangan, dimana setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah memperhatikan lingkungan sekitar.
- e) Kestinambungan, dimana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga pembangunan tersebut nantinya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat. Selain itu setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif. Dan setiap pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

2. Walaupun Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya pada masalah pembangunan kebanyakan sudah sesuai, namun masih ada sebagian yang kurang sesuai yakni berkaitan dengan prinsip transparan (tabel V.5) dan prinsip partisipatif (tabel V.6). Dimana kurangnya kebebasan masyarakat untuk berbicara dan kurang terbukanya untuk menerima informasi, baik itu

informasi yang baik maupun yang buruk. Masyarakat juga kurang merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang terjadi serta kontribusinya untuk perbaikan program.

VI.2. Saran

Demi mencapai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa karya Mulya yang lebih baik lagi, penulis ingin memberi saran kepada pemerintah, pelaku PPK di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah selalu aktif terhadap evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pemerintah bisa secara langsung mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan tersebut .
2. Kepada semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan seharusnya merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.
3. Evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara, dan bersifat terbuka untuk menerima informasi yang baik ataupun yang buruk, penghargaan maupun kritikan.
4. Fungsi dan peran pelaku PPK harus dapat berjalan dengan baik agar tujuan PPK dapat tercapai dengan baik pula yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan

desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Budiman, Arief. 2000. “*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, Zulkarnain.1995. “*Struktur Perekonomian dan strategi Pembangunan Indonesia*”. Jakarta: UI Pres.
- 2001. *Membangun Ekonomi Rakyat (Persepsi tentang pemberdayaan usaha kecil dan koperasi di Riau)*. Riau, UNRI Press.
- Dunn, Wiliam, N. 1995. “*Analisis Kebijakan Publik*”. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- 2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yokyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hamim,Sufian, 2003. *Administrasi Organisasi & Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- 2006. *Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Pekanbaru.
- Herujito, Yayat M, 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta
- 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Lubis,Ibrahim. 1985. *Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mudiyono Dkk. 2005, *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Mukizat. 2000. *Fungsi Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.

Nugroho, Riant D. 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, PT. Elex Media Kompetindo, Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori Dan Praktis Pemerintah Dan Daerah Otonom*. Jakarta, Gramedia.

Prayitno, Hadi, 1987. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta, BPFE

Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia.

Siagian, Sondang P. 2005. "Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Strateginya)". Jakarta: Bumi Aksara.

Soeharto, Edi. 2006. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)". Bandung: Aditama.

Sugiono. 2003. "Metode Penelitian administrasi". Bandung: Alfabeta.

----- 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sule Tisnawati, Erni dan Saefullah, Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.

Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaja, H. A. W, 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta

http://Teguh-Kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/pengawasan_Deptan_TK.pdf

Dokumentasi :

PENJELASAN (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Lokakarya PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008.

Program Pengembangan Kecamatan Fase II 2003-2004, Laporan Tahunan Kedua 2003. Ditjen PMD, Sekretariat pembinaan PPK Konsultan Manajemen Pusat.

Program pengembangan kecamatan Fase Kedua, Laporan Tahunan Ke III 2004. Ditjen PMD, Sekretariat Pembinaan PPK Konsultan Manajemen Pusat.

Program Pengembangan Kecamatan, Laporan Tahunan 2005. Ditjen PMD, Sekretariat Pembinaan PPK Konsultan Manajemen Pusat.

Program Pengembangan Kecamatan, Laporan Tahunan 2006. Ditjen PMD, Sekretariat Pembinaan Kecamatan Manajemen Pusat.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kegiatan Bidang Pembangunan Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu -----	10
Tabel III.1	Pelaku PPK Tingkat Kecamatan-----	52
Tabel III.2	Pelaku PPK Tingkat Desa -----	53
Tabel IV.1	Jumlah Aparat Pemerintah Menurut Desa Tahun 2009 -----	56
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Karya Mulya Berdasarkan Gender Tahun 2009 -----	64
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Karya Mulya -----	65
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan-----	65
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden -----	69
Tabel V.2	Tingkat Pendidikan Responden -----	70
Tabel V.3	Masa Responden Menjadi Anggota PPK-----	71
Tabel V.4	Tanggapan Responden Terhadap Prinsip Obyektivitas Dan Professional -----	72
Tabel V.5	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Transparan -----	73
Tabel V.6	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Partisipatif-----	75
Tabel V.7	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Akuntabel -----	76
Tabel V.8	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berorientasi solusi---	77
Tabel V.9	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Terintegrasi-----	78
Tabel V.10	Tanggapan Responden Tentang Prinsip Berbasis Indikator Kinerja-----	79
Tabel V.11	Tanggapan Responden Tentang Jumlah Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Mancapai Tujuan Program Pembangunan -	80
Tabel V.12	Tanggapan Responden Tentang Tahapan Dalam Pelaksanaan Pembangunan-----	81
Tabel V.13	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan-----	82

Tabel V.14	Tanggapan Responden Tentang Dana Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan -----	83
Tabel V.15	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Umum Pembangunan	84
Tabel V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Prinsip-Prinsip Evaluasi-----	85
Tabel V.17	Tanggapan Responden Tentang Kekayaan Rata-Rata-----	89
Tabel V.18	Tanggapan Responden Tentang Pemerataan-----	90
Tabel V.19	Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Kehidupan-----	92
Tabel V.20	Tanggapan Responden Tentang Keseimbangan-----	93
Tabel V.21	Tanggapan Responden Tentang Kestinambungan -----	95
Tabel V.22	Tanggapan Responden Tentang Hasil Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat-----	96
Tabel V.23	Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Mendukung Kelancaran Ekonomi Masyarakat -----	97
Tabel V.24	Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Melibatkan Semua Unsur Masyarakat Secara Aktif-----	98
Tabel V.25	Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Ditujukan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat-----	99
Tabel V.26	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pembangunan Yang Dilaksanakan Di Desa Karya Mulya-----	100
Tabel V.27	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi PPK Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Karya Mulya-----	103

KUISONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i
Anggota PPK Rambah Samo
Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu/Sdr/I dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak kurang suatu apapun dimana saja berada.

Untuk menyelesaikan studi SI (Strata Satu) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disyaratkan mahasiswa membuat karya ilmiah yaitu skripsi. Karena itu, Peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i studi memberikan informasi kepada peneliti tentang pelaksanaan PPK / PNPM Mandiri khususnya pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Karya Mulya dengan cara mengisi kuesioner dibawah ini. Bapak/IBu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah.

Atas kerja sama yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

A. Identitas Peneliti:

Nama : Marlinda Nurlela
NIM : 10675005113
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : SI (Strata Satu)

B. Identitas Responden:

Nama :
Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
Pendidikan Terakhir :
Umur :
Lama Jadi Anggota PPK :

C. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini bersifat ilmiah.
2. Tidak membawa dampak negative kepada siapapun.
3. Jawablah pertanyaan dibawah sesuai dengan kenyataan yang ada.
4. berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar dan sesuai.

Kuesioner Penelitian

A. Evaluasi

1. Sudah sesuaikah prinsip obyektifitas dan professional, dimana pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin berdasarkan fakta dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai

2. Sudah sesuaikah prinsip transparan, dimana hasil dari pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya diketahui oleh semua pihak?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
3. Sudah sesuaikah prinsip partisipatif, dimana semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
4. Sudah sesuaikah prinsip akuntabel, dimana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal?
 - a. Sangat Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
5. Sudah sesuaikah prinsip berorientasi solusi, dimana pelaku program dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
6. Sudah sesuaikah prinsip terintegrasi, dimana adanya kerjasama antara pelaku program dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
7. Sudah sesuaikah prinsip berbasis indikator kinerja, dimana kriteria, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program dapat dirasakan oleh semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

8. Sudah sesuaikah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
9. Sudah sesuaikah tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
10. Sudah sesuaikah perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
11. Sudah sesuaikah dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
12. Sudah sesuaikah tujuan umum dari program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya, dimana meningkatnya pengembangan kemandirian masyarakat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

B. Pembangunan

1. Sudah sesuaikah prinsip kekayaan rata-rata, dimana pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Karya Mulya meningkat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

2. Sudah sesuaikah prinsip pemerataan, dimana pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat?
 - a. sangat sesuai
 - b. sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
3. Sudah sesuaikah prinsip kualitas kehidupan, dimana kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya meningkat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
4. Sudah sesuaikah prinsip keseimbangan, dimana setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya memperhatikan lingkungan sekitar?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
5. Sudah sesuaikah prinsip kesinambungan, dimana setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat berkelanjutan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
6. Sudah sesuaikah hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Karya Mulya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
7. Sudah sesuaikah dimana pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya dapat mendukung kelancaran ekonomi masyarakat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

8. Sudah sesuaikah dimana pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya melibatkan semua unsur masyarakat secara aktif?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

9. Sudah sesuaikah dimana setiap kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai